

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2019 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Dsaerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja-SKPD ini disusun berdasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam mewujudkan kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup serta hutan. Dengan adanya Renja-SKPD, pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 diharapkan memiliki pedoman yang jelas.

Kami menyadari, bahwa penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja-SKPD ini kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta , 2018
Kepala Dinas



Ir. R. Sutarto, MP
19601001 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.4 Sistematika Penulisan	1-4
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	2-12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	2-12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-1
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-7
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	2-13
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	3-2
3.3 Program dan Kegiatan	3-3
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	4-1
BAB 5 PENUTUP	5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-1
Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-5
Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-13
Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-1
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah2-8

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap OPD wajib menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Renja-OPD itu sendiri adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang secara substansial menjabarkan program kerja OPD yang telah ditetapkan dalam renstra instansi. Renja OPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

Visi pembangunan DIY yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”** yang selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) misi yaitu

1. Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis

Sejalan dengan misi pertama pembangunan DIY 2017-2022 yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban” dengan penekanan pada aspek peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan menurunkan angka kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan ketimpangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan fungsi tata ruang, daya dukung, serta daya tampung lingkungan guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Penjabaran dari arah kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017-2022.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tata kelola lingkungan hidup dan hutan yang lestari, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menyusun renja 2019 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta;

24. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146.12/KEP/2013 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2012-2017
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Tanggal 20 Mei 2014

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2019 adalah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan yang kemudian dijabarkan dalam rencana program/ kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2019 dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 agar sesuai dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan arah pembangunan DIY pada umumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB 1	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB 2	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB 3	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
BAB 4	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB 5	PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Urusan Lingkungan Hidup

Anggaran untuk urusan lingkungan hidup pada tahun 2017 sebesar Rp 25.778.772.798,80 (Dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh rupiah), dengan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2017 belum bisa dihitung. Anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 3.123.692.273,80,- (Tiga milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh rupiah).
2. Belanja Langsung, sebesar Rp 15.357.875.900,00 (Lima belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 22.654.971.525,00 (Dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)

Berdasarkan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program/kegiatan BLH DIY Tahun 2017, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan seperti dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
(Januari s.d Desember 2017)
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2017)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD (tahun 2016)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2016)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2017)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	01	01								
1	01	01	01	Urusan Lingkungan Hidup						
1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik						
1	01	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						
1	01	01	04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						
1	01	01	05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						
1	01	01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor						
1	01	01	07	Penyediaan Barang Cetak Dan Peggandaan						
1	01	01	08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2017)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD (tahun 2016)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2016)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2016)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	01	09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD								
1	01	01	10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan									
1	01	01	11	Penyediaan Makanan Dan Minuman									
1	01	01	12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah									
1	01	01	13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja									
1	01	01	14	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD									

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2017)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD (tahun 2016)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2016)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2016)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01 02	Program Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%		100%					
1	01 02 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional								
1	01 02 02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor								
1	01 02 03	Pengadaan Mebeleur								
1	01 02 04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor								
1	01 02 05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								
1	01 02 06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor								
1	01 02 07	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor								

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2017)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja SKPD (tahun 2016)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2016)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2017)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		100%			
1	01	03	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal							
1	01	03	02	Pengembangan ISO							
1	01	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terwujudnya peñata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%		100%			
1	01	04	01	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD							
1	01	04	02	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD							
1	01	04	03	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi							
1	01	04	04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD							

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2017)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD (tahun 2016)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2016)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2017)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	11	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									
1	11	15	015	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penambahan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri	80 kelompok	n/a	n/a	50 kelompok	100 %	80 kelompok	80 kelompok	100
1	11	16		Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemar air	18,96 %	100 %	14,95%	14,95%	100 %	14,95 %	14,95 %	100
					Sumber Pencemar Udara	11,26 %	100 %	9,01 %	9,01 %	100 %	9,01 %	9,01 %	100
1	11	16	069	Pengkajian Dokumen Lingkungan									
1	11	16	070	Pengendalian Pencemaran Lingkungan									
1	11	16	017	Pengendalian perusakan Lingkungan									
1	11	17		Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya Alam									
1	11	17	028	Konservasi dan Keanekaragaman hayati	Peningkatan luas lahan terkonservasi	45 ha	133,3%	36 ha	96 ha	266,6 %	45 ha	149 ha	331,1%
					Jumlah Telaga Desa	4 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %	4 unit	4 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2017)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD (tahun 2016)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2016)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	11	19		Program Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Jenis data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	11 jenis	8 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	11 Jenis	11	100
1	11	19	018	Penyediaan data Informasi dan Edukasi Lingkungan Hidup ke masyarakat									
1	11	24		Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)									
1	11	24	005	Penataan RTH	Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	58,33%	28,11%	46,67%	39,78%	85,25%	58,33%	39,8%	68,23%

2.1.2. Urusan Kehutanan

Pada tahun 2017, urusan kehutanan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, dan (2) Meningkatnya daya dukung hutan untuk keseimbangan lingkungan. Sasaran strategis tersebut telah disesuaikan dengan perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Selanjutnya target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya diukur dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis urusan kehutanan DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan	%	35,24	36,09	102,41
2	Meningkatnya daya dukung hutan untuk keseimbangan lingkungan	Peningkatan luas hutan	%	0,16	0,53	331,25

Berdasarkan tabel diatas, 2 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 66,67% dari total indikator. Capaian yang tertinggi pada indikator Peningkatan Luas Hutan dengan persentase 331,25%.

Hasil pencapaian yang ditunjukkan oleh indicator kinerja dapat memberikan gambaran pencapaian rencana strategis urusan kehutanan di tahun 2017. Evaluasi dan analisis secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

Pada tahun 2017 pemanfaatan hutan berada pada angka 36,09 %, dimana jika dibandingkan dengan target sebesar 35,24 % maka sudah malampauinya. Dari total luas hutan sebesar 18.715 ha, telah dimanfaatkan seluas 6.753,76 ha yang digunakan untuk produksi minyak kayu putih sebesar 3.771,26 ha dan untuk produksi kayu seluas 2.985,50 ha. Tegakan minyak kayu putih dengan kondisi normal hanya seluas 104,70 ha dan 3.666,56 ha tegakan kayu putih dengan kondisi bertumbuhan kurang. Sedangkan untuk tegakan kayu seluas 2.985,00 ha terdiri dari tegakan jati dan rimba lain dengan kondisi tegakan normal.

Tantangan terbesar dalam mencapai sasaran ini adalah kondisi tegakan yang mayoritas masih dalam kondisi bertumbuhan kurang. Selain itu masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain sehingga menghambat upaya pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah pemanfaatan hutan adalah dengan melakukan kegiatan pengutuhan tegakan hingga jumlah tanaman menjadi normal dan dimanfaatkan secara optimal. Selain itu juga dapat dikembangkan kegiatan yang tidak tergantung pada jumlah tegakan, misalnya dengan pengembangan wisata alam di hutan produksi. Pemanfaatan kawasan hutan sebagai wisata alam bias dilakukan dengan skema swakelola maupun kerja sama dengan masyarakat sekitar hutan

2. Sasaran Peningkatan Daya Dukung Hutan untuk Keseimbangan Lingkungan

Indikator untuk sasaran ini adalah meningkatnya luas hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat pada tahun berjalan. Pada tahun 2017 target peningkatan luas hutan yang ditetapkan adalah sebesar 0,16 % namun dapat teralisasi 0,53 % sehingga capaian kinerja untuk sasaran ini mencapai 331,25 %.

Luas hutan total di DIY pada tahun 2016 adalah sebesar 97.018,26 ha yang terdiri dari luas hutan negara sebesar 18.715 ha dan hutan rakyat seluas 78.303,20 ha. Luas tersebut meningkat pada tahun 2017 dimana hutan negara menjadi 19.133,95 ha dan hutan rakyat menjadi 78.400,27 ha. Sebaran hutan di DIY pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Sebaran hutan DIY Tahun 2017

Kabupaten	Hutan Negara (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Total (ha)	Presentase (%)
Gunung Kidul	15.001,15	44.110,87	59.112,02	60,61
Bantul	1.035,18	8.595,50	9.630,68	9,87
Sleman	2.051,13	4.898,30	6.949,43	7,13
Kulon Progo	1.046,49	20.795,60	21.842,09	22,39

Sumber : LKjIP Dishutbun tahun 2017, 2018

Peningkatan luas hutan negara dikarenakan adanya perubahan luas kawasan hutan pada kawasan Taman Nasional Gunung Merapi setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Balai Pengukuhan Kawasan Hutan.

Luas hutan rakyat dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif jika dibandingkan dengan luasan hutan negara. Hal ini karena hutan rakyat berada pada lahan masyarakat dimana pengelolaannya merupakan kewenangan mutlak dari pemilik lahan termasuk jika lahan hutan tersebut akan dialihfungsikan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk dapat menjaga kestabilan atau bahkan meningkatkan luasan hutan rakyat melalui optimalisasi penyuluhan, pengaturan daur tanam, pemanfaatan lahan bawah tegakan, dan lain sebagainya sehingga hutan rakyat sebagai penyumbang terbesar tutupan hutan di DIY tetap terjaga keberadaannya.

Pada tahun 2017 jumlah total anggaran belanja yang dikelola untuk urusan kehutanan adalah sebesar Rp. 44.125.036.360,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 23.254.039.234,- dan Belanja Langsung Sebesar Rp. 20.870.997.126,-. Selain mengelola anggaran belanja, sektor kehutanan juga memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah sebesar Rp. 10.482.304.000,- yang diperoleh dari hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang terdiri atas penjualan produksi hasil kebun, penjualan produksi bibit dan penjualan hasil kehutanan berupa minyak kayu putih dan kayu, retribusi jasa wisata alam di Tahura Bunder, dan retribusi pengelolaan hutan lindung Mangunan. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 41.701.828.566,- (94,51%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 22.543.192.248,- (96,94%) dan belanja langsung sebesar Rp 19.158.636.318,- (91,79%).

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja urusan kehutanan dan Pencapaian Renstra urusan kehutanan sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
A	Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	Persentase Kawasan Hutan Tertata	87.40%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Kehutanan yang Memiliki Sertifikat	2%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Penataan Hutan	Penataan Kawasan Hutan	4 kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Pengawasan tata usaha kayu dan peredaran hasil hutan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pengelolaan hutan rakyat dan perhutanan sosial	4 kabupaten	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
B	Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.62 rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Perlindungan Hutan	Perlindungan Hutan Terjamin	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan	Penyusunan dokumen perencanaan teknis pengelolaan hutan	3 kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Rehabilitasi dan Produksi Hasil Hutan	2 Komoditas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
C	Program Pengelolaan Hutan Konservasi	Persentase Hutan Konservasi Terkelola	75.86%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Pengelolaan Operasional Tahura Bunder	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Pengelolaan dan Perencanaan Pengembangan Pelayanan Tahura Bunder	4 kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
D	Program Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
F	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
G	Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan	Produksi bibit bersertifikat yang ditanam	325.000 batang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	bibit/benih tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan	600.000 batang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
H	Program Pengelolaan Tutupan Lahan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Akumulasi penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi	160 Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Pengamanan Hutan	Keamanan Hutan Terjamin	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Konservasi Sumberdaya Hutan	Pembinaan dan Pengendalian Konservasi Sumberdaya Hutan	2 kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	Pengelolaan DAS Prioritas	1 Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
I	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	86.60 rasio	86.60 rasio	100%
1	Penataan Hutan	Penataan Kawasan Hutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
2	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Pengawasan tata usaha kayu dan peredaran hasil hutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pengelolaan hutan rakyat dan perhutanan sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 kabupaten	4 kabupaten	100%
J	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.10%	0.10%	100%
1	Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Produk Hasil Hutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Komoditas	2 Komoditas	100%
K	Program Konservasi Dan Perlindungan Hutan	Persentase Penurunan kerusakan hutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.10%	0.10%	100%
1	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	bibit/benih tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	325.000 batang	325.000 batang	100%
2	Perlindungan Hutan	Perlindungan Hutan Terjamin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%
3	Pengamanan Hutan	Keamanan Hutan Terjamin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%
4	Konservasi Sumberdaya Hutan	Pembinaan dan Pengendalian Konservasi Sumberdaya Hutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	Pengelolaan DAS Prioritas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Tahun	1 Tahun	100%

Beberapa isian dalam kolom 4 dan 5 kosong karena kegiatan tahun 2017 pengisiannya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, sedangkan program kegiatan tahun 2019 disusun berdasarkan dokumen Rancangan RPJMD 2017-2022. Dengan demikian maka capaian tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2018 dan tahun 2019.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup yang telah ditetapkan yaitu PerMen LH No 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas:

- a. Pelayanan informasi status mutu air
- b. Pelayanan informasi status mutu udara ambien; dan
- c. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan LH.

Adapun target dan pencapaiannya Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Target capaian SPM

No.	Indikator	SPM/ Stand ar nasion al	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Thn n- 2	Thn n- 1	Thn n	Thn n+1	Thn n-2	Thn n- 1	Th n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	100		4,51%	6,76%	9,01%	11,26 %	100 %	100%	100 %	100 %	
2	Persentase Peningkatan Kualitas Air	100		7,48%	11,21 %	14,95 %	18,69 %	86,6 7%	98,75 %	99%	100 %	
3	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan LH	100		100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100 %	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh DIY pada tahun 2017 sampai dengan semester pertama yang dapat dicapai, sebagai berikut :

- a. Pelayanan informasi status mutu air pencapaiannya 100 %.
- b. Pelayanan informasi status mutu udara ambien pencapaiannya 100 %
- c. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH pencapaiannya 100 %

Pada tahun 2017, SPM di tingkat pusat sudah ditiadakan, karena peraturan yang mengatur tentang SPM sudah dicabut. Namun demikian, BLH DIY masih menyelesaikan hingga akhir tahun anggaran terkait permintaan laporan SPM dari Biro Administrasi Pemerintahan Setda DIY.

Persoalan lingkungan merupakan persoalan yang lintas wilayah administrasi dan lintas sektor, maka akumulasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota dan lintas instansi sektor akan tercermin pada tingkat capaian kondisi kualitas lingkungan. Secara umum untuk melihat tingkat kinerja urusan wajib bidang lingkungan hidup tahun 2017 dapat dibandingkan indikator antara target dan capaian yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2012 –2017.

Sesuai dengan isu prioritas lingkungan hidup di DIY seperti disebutkan di atas maka indikator kinerja urusan wajib bidang lingkungan hidup sebagai mana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2017, ada 2 indikator yaitu Persentase peningkatan kualitas air dan Persentase peningkatan kualitas udara.

Tabel 2.6. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra 2017	Capaian terhadap target akhir Renstra 2017 (%)
			Target (%)	Realisasi	Realisasi %		
1	Prosentase peningkatan kualitas air	14,95%	18,96	100	14,95	18,96	100
2	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	9,01%	11,26	100	9,01	11,26	100

Adapun penjelasan dari masing-masing target dan capaian indikator kinerja bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Kualitas Air

Angka persentase peningkatan kualitas air pada tahun 2017 dihitung berdasarkan hasil pemantauan 11 sungai, yaitu sungai Winongo, Code, Gajahwong, Kuning, Konteng, Tambakbayan, Bedog, Oyo, Belik, Bulus dan Opak. Parameter kunci yang digunakan untuk menilai kualitas air adalah parameter Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dan Bakteri Koli (Fecal Coliform). Realisasi capaian BOD sebesar 7,0 mg/l dari target yang ditetapkan < 9 mg/l, tercapai 100%. Nilai realisasi capaian parameter COD rata-rata 14,2 mg/l dari target < 45 mg/l, tercapai 100% dan realisasi capaian Bakteri Koli rata-rata 25.061 MPN/100 ml dari target yang ditetapkan <175.000 MPN/100 ml, tercapai 100%. Sehingga capaian 3 parameter BOD, COD dan Bakteri Koli dirata-rata, hasilnya 100 %. Target capaian persentase peningkatan kualitas air sebesar 18,69% dapat teralisasi sebesar 18,69% (atau capaian target sebesar 100%). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BLH DIY tahun 2017 sebesar 18,69 %, maka capaiannya adalah 100%. Pada tabel diatas

target capaian persentase peningkatan kualitas air sebesar 14,95% realisasinya sebesar 14,95 % (atau capaian target sebesar 100%). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BLH DIY tahun 2017 sebesar 18,96%, maka telah mencapai 78,85%, mengalami peningkatan daripada capaian pada tahun 2015 (59,23%).

Berdasarkan hasil uji pemantauan kualitas air sungai untuk parameter bakteri koli, parameter BOD dan COD, menunjukkan telah memenuhi target yang ditetapkan. Turunnya kandungan BOD, COD dan koli tinja di sungai merupakan hasil upaya yang dilakukan pemerintah melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini merupakan upaya memperbaiki kualitas lingkungan, melalui kegiatan pemantauan kualitas air yang dilaksanakan 3 periode dalam satu tahun, di 11 sungai di DIY. Upaya lain untuk menurunkan beban pencemaran air melalui kegiatan pengawasan penataan hukum lingkungan dan pembinaan pengendalian pencemaran air dan bahan beracun dan berbahaya (B3). Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan kualitas air adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari 3 kegiatan, dan Program Pengelolaan Persampahan terdiri 1 (satu) kegiatan.

2. Persentase Peningkatan Kualitas Udara

Angka persentase peningkatan kualitas udara pada tahun 2017 didasarkan hasil uji pemantauan udara ambien yang dilakukan BLH DIY dengan obyek pemantauan selama II (dua) periode. Periode I pada bulan Mei - Juni 2017 dan Periode II pada bulan November 2017. Pemantauan Periode I udara ambien dilakukan pada *roadside* sebanyak 31 titik, dan di sekitar industri sebanyak 20 titik. Pemantauan periode II udara ambien dilakukan pada *roadside* sebanyak 25 titik dan dengan sistem grid sebanyak 25 titik. Pemantauan udara pada *roadside* dilakukan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, sedangkan pemantauan dengan sistem Grid baru dilakukan pada 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Yogyakarta). Dari hasil pengujian menunjukkan realisasi capaian parameter *Carbon Monoksida* (CO) dengan nilai rata-rata 829,19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dari target yang ditetapkan $<8.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sehingga tercapai 100%. Realisasi capaian parameter *Hidro Carbon* (HC) dengan nilai rata-rata 16,74 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dari target yang ditetapkan $<130 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sehingga tercapai 100%. Capaian 2 (dua) parameter CO

dan HC dirata-rata hasilnya 100% (Capaian indikator peningkatan kualitas udara tercapai sebesar 11,26% sampai dengan akhir tahun 2017). Hasil persentase peningkatan kualitas udara dikategorikan sangat baik karena telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 11,26 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BLH DIY terhadap capaian RPJMD 2017 telah mncapai 100%, yaitu dari target Renstra sebesar 11,26% tercapai sebesar 11,26%.

Adapun program/kegiatan BLH DIY TA 2017 yang mendukung tercapainya target sasaran peningkatan kualitas udara adalah Program pengendalian pencemaran dengan kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara. Upaya memperbaiki kualitas udara ambien dilaksanakan dengan penanaman pohon perindang di perkotaan, penyadaran publik melalui uji emisi kendaraan bermotor serta pembinaan kepada pelaku usaha yang potensial menimbulkan pencemaran udara dan potensi perusakan lapisan ozon.

Adapun program/kegiatan BLH DIY TA 2017 yang mendukung tercapainya target sasaran peningkatan kualitas udara adalah Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan.

2.2.2. Urusan Kehutanan

Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa luasan hutan dalam setiap DAS atau pulau minimal sebesar 30% dari luas daratannya dan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya.

Luas hutan rakyat merupakan komponen utama penyumbang persentase luas hutan di DIY dimana luas hutan rakyat mencapai 80,71% dari total luas hutan di DIY. Pada tahun 2016 hutan rakyat tercatat seluas 78.303,20 hektar dan hutan Negara tercatat seluas 18.715,06 hektar yang tersebar di 4 kabupaten di DIY sehingga total luasan hutan di DIY pada tahun 2016 mencapai 97.018,26 hektar atau sebesar 30,45 % dari total luasan DIY. Dengan demikian luasan hutan di DIY telah mencukupi luasan minimal seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Hutan rakyat sebagaimana layaknya hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat maka pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemilik. Hal ini berarti bahwa pemilik/ masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap hutan itu, dalam artian apabila diperlukan maka hutan rakyat bisa dipanen/ditebang atau fungsi lahannya dialihkan untuk keperluan lain. Kondisi inilah yang menyebabkan luasan hutan rakyat relatif kurang stabil apabila dibandingkan dengan luasan hutan negara. Diperlukan usaha-usaha untuk menjaga kestabilan luasnya agar luas hutan di DIY dapat terjaga pada angka yang stabil bahkan meningkat. Salah satu alternatif cara pengelolaannya adalah dengan pengaturan daur tanam selain pola pengelolaan terpadu antara tanaman kehutanan dan tanaman lain yang bernilai ekonomis sehingga keberadaan hutan rakyat bisa dipertahankan.

Hutan negara bisa dikatakan lebih stabil luasannya karena tidak mengalami perubahan. Walaupun begitu, diperlukan upaya peningkatan pengelolaan hutan agar fungsi hutan baik secara ekonomi, sosial dan ekologis dapat berjalan.

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahu n... (thn n-2)	Tahu n... (thn n-1)	Tahu n... (thn n)	Tahu n... (thn n+1)	Tahu n... (thn n-2)	Tahu n... (thn n-1)	Tahu n... (thn n)	Tahu n... (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)	(13)
	Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan (%)***			35,24	n/a	n/a	n/a	36,09	n/a	n/a	n/a	
	Peningkatan luas hutan (%)***			0,16	n/a	n/a	n/a	0,53	n/a	n/a	n/a	
	nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (juta rupiah)			n/a	734,713	742,060	749,480	n/a	n/a	742,060	749,480	
	persentase tutupan vegetasi dibagi luas wilayah			n/a	19.41	19.96	20.5	n/a	n/a	19.96	20.5	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai fungsi :

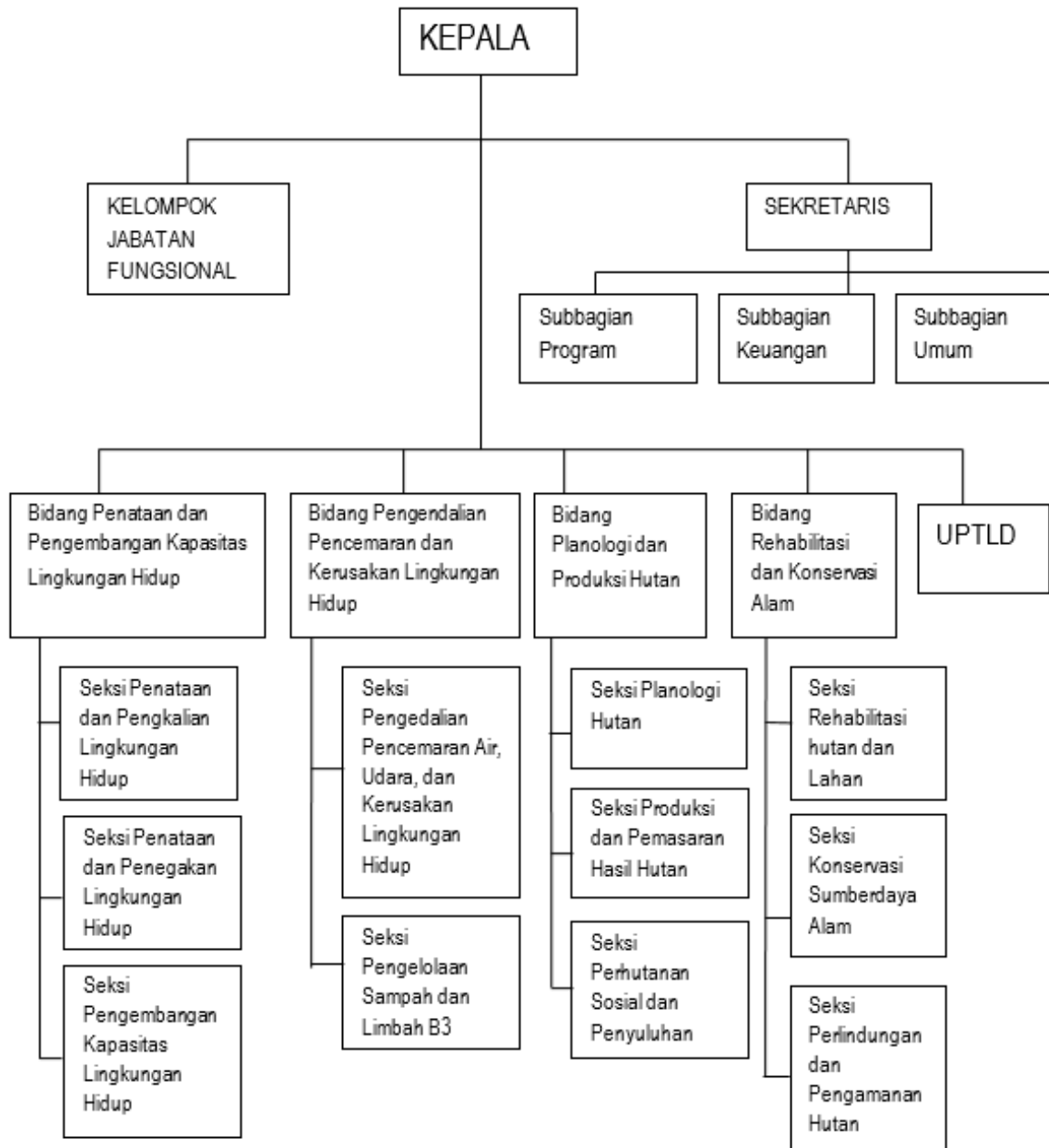
1. penyusunan program dan pengendalian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
4. pembinaan pengendalian lingkungan hidup;
5. pengelolaan keanekaragaman hayati;
6. pembinaan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
7. pengelolaan sampah di TPA/TPST regional;
8. pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pengaduan dibidang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLingkungan Hidup);
9. penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan penaatan lingkungan;
10. pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
11. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
12. pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
13. pelaksanaan keplanologian, produksi hutan dan pemasarannya;
14. pelaksanaan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan;
15. pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), perhutanan sosial dan penyuluhan kehutanan;
16. fasilitasi rehabilitasi dan pemanfaatan lahan di tanah Kasultanan (SG) dan tanah Kadipaten (PAG) melalui pengembangan kehutanan;
17. pengelolaan kawasan hutan;

18. pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara;
19. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di bidang kehutanan;
20. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
21. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program dan Informasi
3. Bidang Penataan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - Seksi Penataan dan Pengkajian Lingkungan Hidup
 - Seksi Penataan dan Penegakan Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
5. Bidang Planologi dan Produksi Hutan
 - Seksi Planologi Hutan
 - Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan
 - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
6. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam
 - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Seksi Konservasi Sumberdaya Alam
 - Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPT

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan sektor kehutanan di DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY masih mendapati beberapa permasalahan selama tahun 2017 yang secara garis besar dibedakan dalam urusan sebagai berikut :

1. Lingkungan Hidup

Secara umum koordinasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dengan kabupaten/kota cukup kondusif untuk mewujudkan

peningkatan kualitas lingkungan hidup. Koordinasi dan sinergisitas dilakukan sejak awal perencanaan, teknis pelaksanaan maupun pada saat evaluasi kegiatan. Hal ini didukung oleh faktor geografis terutama ada hubungan hulu hilir antara kabupaten/kota yang ada di DIY, seperti Kabupaten Sleman, kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Disamping itu kemudahan koordinasi juga disebabkan oleh faktor jarak yang relatif berdekatan antara ibu Kota provinsi dan ibu Kota kabupaten/Kota.

Sasaran kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh DIY dan kabupaten/kota untuk kegiatan seperti: pemantauan kualitas lingkungan, konservasi sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, pengendalian pencemaran dan penegakan hukum lingkungan relatif terkoordinasikan sehingga tidak tumpang tindih.

Koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian lingkungan Hidup juga relatif baik. Program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional juga banyak yang dilaksanakan oleh DIY dan Kabupaten/kota dan ada sinergisitas yang positif. Program/kegiatan pemerintah pusat seperti Adipura, Adiwiyata, Proper, Prokasih, Prolabir, juga dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang handal untuk mewujudkan masyarakat DIY Berbudaya dan berwawasan Lingkungan, ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan pengolahan limbah untuk menghasilkan limbah yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama pengendalian pencemaran air sungai dan tanah.
2. Kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan jumlahnya masih terbatas,serta pemahaman yang masih minim tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan. Kondisi ini menyebabkan replikasi percontohan tentang pengelolaan lingkungan belum berkembang secara cepat seperti yang diharapkan.

3. Peningkatan aktifitas transportasi sebagai peningkatan taraf ekonomi masyarakat, yang menyebabkan peningkatan pencemaran udara terutama di wilayah perkotaan. Bertambahnya kegiatan industry dan volume kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara yang ditandai dengan peningkatan polutan udara seperti CO, NO₂, HC dan partikulat. Pencemaran udara perkotaan diperburuk adanya kemacetan lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu.
4. Keberpihakan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relative rendah sehingga upaya penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor lain. Pengelolaan lingkungan hidup masih sebagai pelengkap pembangunan di daerah dan belum dijadikan arus utama pembangunan.
5. Permasalahan sampah di perkotaan belum menerapkan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), masih adanya pembuangan sampah di sungai, pembuangan limbah cair dari home industri yang belum diolah, dan alih fungsi lahan.
6. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di daerah tangkapan air menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun.
7. Penurunan kualitas sumberdaya hutan dan lahan yang ditandai dengan semakin bertambahnya luasan lahan kritis.
8. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak.
9. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3.
10. Kurangnya lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

2. Kehutanan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain diluar kepentingan kehutanan sehingga menghambat upaya pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal.
2. Masih terjadi fenomena tumpang sari abadi, okupansi kawasan, perencekan kayu bakar dan hijauan makanan ternak (HMT) di hutan negara yang disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang.

3. Luasan hutan rakyat cukup rentan mengalami penurunan karena merupakan hutan hak dimana pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemilik lahan sementara luas tutupan vegetasi minimal suatu daerah adalah 30 % dimana 80,28 % dari total luasan hutan di DIY berasal dari hutan rakyat.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap capaian visi dan misi DIY. Berkaca pada permasalahan yang ada maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mencoba memanfaatkan peluang dan tantangan dalam upaya meningkatkan kinerjanya dengan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya, yaitu :

1. Hutan berperan dalam menjaga kondisi ekosistem melalui fungsi ekologis dengan mewujudkan pengelolaan hutan lestari
2. Pengembangan pemanfaatan hutan untuk pariwisata merupakan sebuah peluang yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar hutan dan memberikan peluang keterlibatan masyarakat sehingga mampu memberikan peningkatan penghasilan.
3. Hutan sebagai wahana pendidikan, sarana kepentingan budaya masyarakat, dan religi melalui fungsi sosialnya

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam pembangunan sektor kehutanan dan pengelolaan lingkungan diantaranya adalah :

1. Pengelolaan hutan secara lestari baik dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial
2. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang masih relatif tinggi
3. Semakin meningkatnya aktivitas pariwisata didalam kawasan hutan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada tahun 2019 untuk urusan kehutanan menetapkan program prioritas sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan
3. Peningkatan produksi hasil hutan
4. Pembangunan sektor kehutanan yang terintegrasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 ini mengacu pada Dokumen Rancangan RKPD tahun 2019. Secara terperinci review terhadap rancangan awal RKPD 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Keluaran/Tolok Ukur Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Keluaran/Tolok Ukur Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN				PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN				Rp 5,500,216,620
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor 2 kali	Tersedianya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp 1,400,000,000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor 2 kali	Tersedianya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp 1,520,000,000	
		Materai sebanyak 2340 lembar (materai 6000 & 3000)				Materai sebanyak 2340 lembar (materai 6000 & 3000)			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah				Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah			
		Terkelolanya surat masuk 1000 surat				Terkelolanya surat masuk 1000 surat			
		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan				Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan			
		Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan				Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan			
		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit				Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit			

	<p>Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan</p>			<p>Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan</p>		
	<p>Terlaksananya penataan arsip 12 m2</p>			<p>Terlaksananya penataan arsip 12 m2</p>		
	<p>Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis</p>			<p>Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis</p>		
	<p>Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis</p>			<p>Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis</p>		
	<p>Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis</p>			<p>Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis</p>		
	<p>Terlaksananya penggandaan/foto copy 100.000 lembar</p>			<p>Terlaksananya penggandaan/foto copy 100.000 lembar</p>		
	<p>Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat</p>			<p>Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat</p>		
	<p>Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box</p>			<p>Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box</p>		
	<p>Tersedianya bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama 12 bulan</p>			<p>Tersedianya bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama 12 bulan</p>		

		Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis				Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis		
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Rp 2,100,000,000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Rp 3,280,216,620	
	Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan				Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan			
	Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan				Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan			
	Tersedianya Tenaga jasa kearsipan 6 orang				Tersedianya Tenaga jasa kearsipan 6 orang			
	Tersedianya Tenaga jasa driver /sopir 8 orang				Tersedianya Tenaga jasa driver /sopir 8 orang			
	Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorar/Tidak tetap 12 bulan				Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorar/Tidak tetap 12 bulan			
	Terlaksananya Pengelolaan Barang 12 bulan				Terlaksananya Pengelolaan Barang 12 bulan			
	Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3				Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3			
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan	Terlaksananya koordinasi	Rp 700,000,000	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan	Terlaksananya koordinasi dengan	Rp 700,000,000	

		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan	dengan pihak terkait secara lancar 100%			Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan	pihak terkait secara lancar 100%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp 3,856,039,500	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp 4,216,731,500	
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%	Rp 622,574,000	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%	Rp 622,574,000	
	Terlaksananya Rehabilitasi Kantor RPH Semanu dan RPH Giring 1 paket				Terlaksananya Rehabilitasi Kantor RPH Semanu dan RPH Giring 1 paket			
	Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP 1 paket				Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP 1 paket			
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%	Rp 850,000,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%	Rp 850,000,000	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor 10 unit	Terlaksananya pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 100%	Rp 700,000,000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor 10 unit	Terlaksananya pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 100%	Rp 700,000,000	

	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan kendaraan dinas operasional 230 unit	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100%	Rp 900,000,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan kendaraan dinas operasional 185 unit	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100%	Rp 1,456,420,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 36 jenis	Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100%	Rp 783,465,500	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 36 jenis	Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100%	Rp 587,737,500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR				Rp 26,776,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp 26,776,000
	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 100 %	Rp 26,776,000	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 100 %	Rp 26,776,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN				Rp 334,700,000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp 684,700,000
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan) Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100%	Rp 27,500,000	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan) Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100%	Rp 27,500,000

	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan) Laporan Keuangan Semester (2 laporan) Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan) Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban keuangan 100% tepat waktu	Rp 57,200,000	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan) Laporan Keuangan Semester (2 laporan) Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan) Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban keuangan 100% tepat waktu	Rp 57,200,000
	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perangkat Daerah 1 kali Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen Publikasi LH di Media Publik 3 media Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen) Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019 (2 dokumen) Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	Rp 200,000,000	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perangkat Daerah 1 kali Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen Publikasi LH di Media Publik 3 media Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen) Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019 (2 dokumen) Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	Rp 550,000,000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 100%	Rp 50,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 100%	Rp 50,000,000

PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp 2,000,000,000	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp 2,000,000,000
Pengkajian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Validasi KLHS 5 Kab/ Kota	Terlaksananya pengkajian lingkungan hidup 100 %	Rp 1,490,000,000	Pengkajian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Validasi KLHS 5 Kab/ Kota	Terlaksananya pengkajian lingkungan hidup 100 %	Rp 1,490,000,000
	Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 12 bulan				Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 12 bulan		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan		
	Terlaksananya Penyusunan IKPLHD 1 dokumen				Terlaksananya Penyusunan IKPLHD 1 dokumen		
	Terlaksananya Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY 1 dokumen				Terlaksananya Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY 1 dokumen		
Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan	Terlaksananya penataan dan penegakan hukum lingkungan terpadu 100 %	Rp 510,000,000	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan	Terlaksananya penataan dan penegakan hukum lingkungan terpadu 100 %	Rp 510,000,000
	Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha				Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha		

		Terlaksananya Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan				Terlaksananya Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			Rp 2,700,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			Rp 2,700,000,000	
Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Terlaksananya Gerakan bersih sungai : 65 lokasi	Terlaksananya pemantauan pencemaran air, udara dan tanah 100 %	Rp 2,000,000,000	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Terlaksananya Gerakan bersih sungai : 72 lokasi	Terlaksananya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 100 %	Rp 2,000,000,000	
	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air 4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah) : 100 %				Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air 4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah) : 100 %			
	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) : 100 %				Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) : 100 %			
	4. Terlaksananya inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 dokumen				4. Terlaksananya inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 dokumen			
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Koordinasi/ pembinaan pengelolaan limbah B3 : 5 kab/ kota	Terlaksananya pengelolaan sampah dan	Rp 700,000,000	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Koordinasi/ pembinaan pengelolaan limbah B3 : 5 kab/ kota	Terlaksananya pengelolaan sampah dan limbah 100 %	Rp 700,000,000	

		Pengelolaan Sampah : 5 Kab/kota	limbah 100 %			Pengelolaan Sampah : 5 Kab/kota		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			Rp 2,400,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			Rp 2,600,000,000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH : 4 penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklam, Kalpataru)	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan dan penghargaan lingkungan hidup 100 %	Rp 1,200,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Terlaksananya pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH : 4 penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklam, Kalpataru)	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan dan penghargaan lingkungan hidup 100 %	Rp 1,400,000,000
Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional)		Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional)						
Terselenggaranya pameran dalam dan luar daerah		Terselenggaranya pameran dalam dan luar daerah						
Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan : 5 kab/kota		Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklam, Kalpataru) : 5 kab/kota						
						Sosialisasi Ekoefisiensi Gemi Nastiti Ngati-ati : 5 kab/kota		

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY (DLHK dan BPIPBPJK) : 1 unit	Terlaksananya ya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY 100 %	Rp 1,200,000,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY (DLHK dan BPIPBPJK) : 1 unit	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY 100 %	Rp 1,200,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM			Rp 4,968,006,510	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM			Rp 8,668,006,000
Peningkatan tutupan vegetasi	DED Pengembangan Wanadesa Caturharjo : 1 dokumen DED Pengembangan Wanadesa Singosaren, Tamanan, Wirokerten : 1 dokumen Monitoring Wanadesa : 4 Kab Pemeliharaan Wanadesa : 10 lokasi Penanaman RTH JJLS - Rest Area : 1 paket Pengembangan Wanadesa Wisata Brosot, Galur, Kulon Progo : 1 lokasi	Terlaksananya ya peningkatan tutupan vegetasi 100 %	Rp 2,090,448,510	Peningkatan tutupan vegetasi	DED Pembangunan RTH 5 Kab/Kota Laporan Monev Wanadesa di 4 Kab Pemeliharaan Wanadesa : 10 lokasi Penanaman RTH JJLS - Rest Area : 1 paket	Terlaksananya peningkatan tutupan vegetasi 100 %	Rp 2,590,448,000
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	Monitoring telagadesa : 2 kab Pembangunan Telagadesa : 1 lokasi Pemeliharaan Telagadesa : 2 lokasi Pengelolaan DAS Prioritas : 12 bulan	Terlaksananya ya pengelolaan DAS 100 %	Rp 1,800,000,000	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	Monitoring telagadesa : 2 kab Pembangunan Telagadesa : 4 lokasi Pemeliharaan Telagadesa : 2 lokasi Pengelolaan DAS Prioritas : 12 bulan Penyusunan DED Telagadesa 12 lokasi	Terlaksananya pengelolaan DAS 100 %	Rp 5,000,000,000

Konservasi Sumberdaya Hutan	Inventarisasi Jenis dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar : 1 dokumen	Terlaksananya ya konservasi sumber daya hutan	Rp 777,558,000	Konservasi Sumberdaya Hutan	Inventarisasi Jenis dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar : 1 dokumen	Terlaksananya korservasi sumber daya hutan	Rp 777,558,000
	Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai : 6 Ha				Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai : 6 Ha		
	Pembinaan masyarakat sekitar KSA/KPA : 30 orang				Pembinaan masyarakat sekitar KSA/KPA : 30 orang		
Pengamanan Hutan	Fasilitasi administrasi penyuluhan kehutanan : 12 bulan	Terlaksananya ya Pengamanan Hutan 100 %	Rp 300,000,000	Pengamanan Hutan	Keamanan Hutan Terjamin : 12 bulan	Terlaksananya Pengamanan Hutan 100 %	Rp 300,000,000
	Keamanan Hutan Terjamin : 12 bulan						
	Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat : 50 orang						
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL			Rp 9,000,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL			Rp 9,000,000,000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill (10 Ha)	Terwujudnya a pengelolaan sampah di TPA Piyungan 600 ton/hari sebesar 100 %	Rp 9,000,000,000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill (10 Ha)	Terwujudnya pengelolaan sampah di TPA Piyungan 600 ton/hari sebesar 100 %	Rp 9,000,000,000
	Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA (1 unit)				Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA (1 unit)		
	Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA(1, 2 Km)				Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA(1, 2 Km)		

	Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik (5 unit)				Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik (5 unit)		
	Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 unit)				Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 unit)		
	Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 unit)				Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 unit)		
	Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA (35 orang)				Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA (35 orang)		
	Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA (2 kali)				Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA (2 kali)		
	Pengadaan Perlengkapan K3 (6 jenis)				Pengadaan Perlengkapan K3 (6 jenis)		
PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN			Rp 865,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN			Rp 865,000,000
Penataan Hutan	Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan : 2 lokasi	Terlaksananya penataan hutan 100%	Rp 315,000,000	Penataan Hutan	Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan : 2 lokasi	Terlaksananya penataan hutan 100%	Rp 315,000,000
	Kajian Potensi Hutan Rakyat : 1 dokumen				Kajian Potensi Hutan Rakyat : 1 dokumen		
	Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Kawasan Hutan : 20 km				Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Kawasan Hutan : 20 km		

		Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan : 2 lokasi				Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan : 2 lokasi		
Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Monitoring dan pembinaan produksi hasil hutan : 4 BDH	Terlaksananya penatausahaan produksi hasil hutan 100 %	Rp 240,000,000	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Monitoring dan pembinaan produksi hasil hutan : 4 BDH	Terlaksananya penatausahaan produksi hasil hutan 100 %	Rp 240,000,000	
	Pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu : 4 BDH				Pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu : 4 BDH			
	Pembinaan penatausahaan hasil hutan : 20 Perusahaan				Pembinaan penatausahaan hasil hutan : 20 Perusahaan			
	Pengendalian peredaran hasil hutan : 4 BDH				Pengendalian peredaran hasil hutan : 4 BDH			
	Penyusunan potensi HHBK dan Jasa Lingkungan di luar kawasan = 2 Kabupaten				Penyusunan potensi HHBK dan Jasa Lingkungan di luar kawasan = 2 Kabupaten			
Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat: 4 kab	Terlaksananya pengelolaan perhutanan sosial 100 %	Rp 310,000,000	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat : 4 kabupaten	Terlaksananya pengelolaan perhutanan sosial 100 %	Rp 310,000,000	
					Fasilitasi administrasi penyuluhan kehutanan : 12 bulan			

					Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat : 50 orang		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG			Rp 7,228,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG			Rp 8,220,527,000
Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	Penyusunan Dokumen Kendali Petak : 1 dokumen	Terlaksana Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya hutan 100 %	Rp 415,000,000	Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	Penyusunan Dokumen Kendali Petak : 1 dokumen	Terlaksana Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya hutan 100 %	Rp 415,000,000
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) : 1 dokumen				Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) : 1 dokumen		
	Penyusunan Rencana Teknis Tahunan : 4 dokumen				Penyusunan Rencana Teknis Tahunan : 4 dokumen		
Perlindungan Hutan	Perlindungan Hutan terjamin : 12 bulan	Terlaksana ya Perlindungan Hutan 100 %	Rp 488,000,000	Perlindungan Hutan	Pencegahan dan penanggulangan gangguan kehutanan: 12 bulan	Terlaksana nya Perlindungan Hutan 100 %	Rp 720,177,000
					Pembinaan dan peningkatan peran masyarakat sekitar hutan di 24 RPH @ 12 kali		
Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Produk Hasil Hutan : 2 komoditas	Terlaksana ya Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan 100%	Rp 6,325,000,000	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Produk Hasil Hutan : 2 komoditas	Terlaksana nya Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan 100%	Rp 7,085,350,000
	Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung : 20 Ha				Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung : 20 Ha		
	Tanaman Kayu Putih Baru : 559.200 batang				Tanaman Kayu Putih Baru : 559.200 batang		

						Pengadaan boiler dan hoist crane 1 unit		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI			Rp 742,872,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI			Rp 1,592,872,000	
Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Pemeliharaan I tanaman bambu : 600 batang	Terlaksananya Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 100 %	Rp 180,000,000	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Pemeliharaan I tanaman bambu : 600 batang	Terlaksananya Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 100 %	Rp 180,000,000	
	Pemeliharaan satwa rusa : 6 ekor				Pemeliharaan satwa rusa : 12 bulan			
	Penataan batas dalam : 2 Km				Penataan batas dalam : 2 Km			
					Penanaman tanaman mentaok dan timoho sebanyak 800 batang			
					Pemeliharaan tanaman di jalan Nguwot sebanyak 300 batang			
Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder : 4 Angkatan @30 orang	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Tahura 100 %	Rp 562,872,000	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder : 4 Angkatan @30 orang	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Tahura 100 %	Rp 1,412,872,000	
	Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) : 3 jenis				Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) : 3 jenis			
	Promosi dan Publikasi Tahura Bunder : 12 bulan				Promosi dan Publikasi Tahura Bunder : 12 bulan			
					Pemeliharaan jalan masuk di Tahura Bunder : 300 m			
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN			Rp 568,673,450	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN			Rp 568,673,000	

Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat : 600.000 batang	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan bersertifikat 100%	Rp 568,673,450	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Bibit tanaman kehutanan bersertifikat : 600.000 batang	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan bersertifikat 100%	Rp 568,673,000
					Sertifikasi bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan 12 bulan		
					Pengawasan peredaran benih/bbit tanaman kehutanan 4 kabupaten		
					Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan 3 jenis		

Tabel 2-9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN				
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor Materai (materai 6000 & 3000) Pengisian tabung pemadam kebakaran Terkelolanya surat masuk Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik Terlaksananya penataan arsip Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan barang cetakan Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penggandaan/foto copy Terlaksananya pengiriman surat keluar Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip Tersedianya bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	2 kali 2340 lb 31 buah 1000 surat 12 bln 12 bln 230 unit 12 bln 12 m2 106 jenis 31 jenis 32 jenis 100.000 lb 2000 surat 75 box 12 bln 46 jenis	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya jasa keamanan kantor selama Terlaksananya pengelolaan keuangan selama Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama Tersedianya Tenaga jasa kearsipan Tersedianya Tenaga jasa driver /sopir Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honoror/Tidak tetap Terlaksananya Pengelolaan Barang Terlaksananya Biaya Fumigasi	12 bln 12 bln 12 bln 6 org 8 org 12 bln 12 bln 84 m3	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya makan dan minum rapat Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	12 bln 12 bln	
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	RPH Semanu dan RPH Giring Tempat parkir Induk dan BP3KP	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Terlaksananya rehabilitasi	1 unit 1 pkt 1 pkt	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	15 jenis	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terpeliharanya Gedung Kantor	10 unit	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perawatan kendaraan dinas operasional	185 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	36 jenis	
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR				
	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penilaian Angka Kredit Penerbitan Jurnal	2 kali 1 kali	
D	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN				
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan) Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)	1 lap 1 lap	
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan) Laporan Keuangan Semester (2 laporan) Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan) Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	12 lap 2 lap 1 lap 4 lap	
	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Forum Perangkat Daerah 1 kali Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen Publikasi LH di Media Publik 3 media	1 kali 1 dok 3 media	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen) Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019 (2 dokumen) Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen)	1 dok 2 dok 2 dok 1 dok	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen)	12 dok	
E	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Pengkajian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya Validasi KLHS 5 Kab/ Kota Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 12 bulan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Terlaksananya Penyusunan IKPLHD 1 dokumen Terlaksananya Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY 1 dokumen	5 kab/kota 12 bln 1 dok 1 dok	
	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan Terlaksananya Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk	40 perusahaan 15 keg/usaha 12 bln	
F	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN				
	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya Gerakan bersih sungai Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air 4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah) Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) Terlaksananya inventarisasi Gas Rumah Kaca	72 lokasi 100 % 100 % 1 dok	
	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinasi/ pembinaan pengelolaan limbah B3 Pengelolaan Sampah	5 kab/ kota 5 Kab/kota	
G	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP				
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH : 4 penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklim, Kalpataru) Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional) Terselenggaranya pameran dalam dan luar daerah	4 penghargaan 3 peringatan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklam, Kalpataru)	5 kab/kota	
			Sosialisasi Ekoefisiensi Gemi Nastiti Ngati-ati	5 kab/kota	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY (DLHK dan BPIPBPJK)	1 unit	
H	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM				
	Peningkatan tutupan vegetasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DED Pembangunan RTH Laporan Monev Wanadesa Pemeliharaan Wanadesa Penanaman RTH JJLS - Rest Area	5 kab/kota 4 kab 10 lokasi 14 pkt	
	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	D.I.Yogyakarta	Monitoring telagadesa Pembangunan Telagadesa Pemeliharaan Telagadesa Pengelolaan DAS Prioritas Penyusunan DED Telagadesa	2 kab 4 lokasi 2 lokasi 12 bln 12 lokasi	
	Konservasi Sumberdaya Hutan	D.I.Yogyakarta	Inventarisasi Jenis dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai Pembinaan masyarakat sekitar KSA/KPA	1 dok 6 ha 30 org	
	Pengamanan Hutan	D.I.Yogyakarta	Keamanan Hutan Terjamin	12 bln	
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL				
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang Operasi dan Pemeliharaan TPST Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA	10 ha 1 unit 1,2 km 5 unit 2 unit 1 unit 35 org 2 kali	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengadaan Perlengkapan K3	6 jenis	
J	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN				
	Penataan Hutan	Dlingo Kokap Paliyan Panggung Saptosari	Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan Kajian Potensi Hutan Rakyat Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Kawasan Hutan Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	2 lokasi 1 dok 20 km 2 lokasi	
	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	D.I.Yogyakarta	Monitoring dan pembinaan produksi hasil hutan Pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu Pembinaan penatausahaan hasil hutan Pengendalian peredaran hasil hutan Penyusunan potensi HHBK dan Jasa Lingkungan di luar kawasan	4 BDH 4 BDH 20 perusahaan 4 BDH 2 kab	
	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Kulonprogo	Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat Fasilitasi administrasi penyuluhan kehutanan Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	4 kab 12 bln 50 org	
K	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG				
	Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH KulonprogoBantul, BDH Panggang	Penyusunan Dokumen Kendali Petak : 1 dokumen Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) : 1 dokumen Penyusunan Rencana Teknis Tahunan : 4 dokumen		
	Perlindungan Hutan	BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH KulonprogoBantul, BDH Panggang	Pencegahan dan penanggulangan gangguan kehutanan: 12 bulan Pembinaan dan peningkatan peran masyarakat sekitar hutan di 24 RPH @ 12 kali		
	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH KulonprogoBantul, BDH Panggang	Produk Hasil Hutan : 2 komoditas Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung : 20 Ha Tanaman Kayu Putih Baru : 559.200 batang Pengadaan boiler dan hoist crane 1 unit		
L	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Playen	Pemeliharaan I tanaman bambu Pemeliharaan satwa rusa Penataan batas dalam Penanaman tanaman mentaok dan timoho Pemeliharaan tanaman di jalan Nguwot	600 btg 12 bln 2 km 800 btg 300 btg	
	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Playen	Pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder : 4 Angkatan @30 orang Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) Promosi dan Publikasi Tahura Bunder Pemeliharaan jalan masuk di Tahura Bunder	120 org 3 jenis 12 bln 300 m	
M	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN				
	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Playen	Pembuatan bibit tanaman kehutanan sebanyak 600.000 batang Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar mutu 12 bulan Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di 4 kabupaten Pembinaan, pengawalan dan pemeliharaan sumber benih tanaman kehutanan di 4 kabupaten	600.000 btg 12 bln 4 kab 4 kab	

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumberdaya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan dalam 5 (lima) prioritas nasional yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019 yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, maka peran utama KLHK yang diusung adalah (1) menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim, (2) menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*, dan (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Pada tahun 2019, KLHK memiliki target 15 DAS, 429 KPH, dan 50 taman nasional serta peningkatan akses masyarakat telah diartikulasikan sebagai dukungan kementerian terhadap pembangunan nasional yang ditunjukkan dengan pencapaian 3 sasaran strategis pada tingkat nasional. 3 sasaran nasional yang dimaksud adalah (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan (3) agenda mewujudkan keandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Arah kebijakan nasional baik itu RKP, Renja KLHK, dan Renja Kementan harus menjadi acuan dan perhatian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2019 sehingga program kegiatan dapat sejalan dengan arah kebijakan nasional dimana hilirnya adalah keberhasilan pembangunan kehutanan dan perkebunan di DIY.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pemerintah DIY merumuskan 4 (empat) pendekatan tematik pembangunan daerah untuk tahun 2019 adalah (1) Mengatasi ketimpangan wilayah, (2) Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, (3) Tindak lanjut/antisipasi pembangunan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA), dan (4) Dukungan pembiayaan pembangunan melalui peran swasta.

Berdasarkan dokumen RKPD DIY 2019, tema pembangunan DIY tahun 2019 adalah **“Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”**. Tema pembangunan tersebut memiliki pengarusutamaan pada isu-isu kesejahteraan rakyat, kemiskinan, disparitas dan optimalisasi kawasan selatan (lokus kewilayahan).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai Organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah DIY dalam melaksanakan dan mengemban tugas pokok dan fungsinya harus mampu menterjemahkan tema RKPD DIY 2019 khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Secara garis besar, sasaran dalam rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2019
1	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB	742.060 (juta rupiah)
2	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Prosentase ketercapaian sasaran pembagunan bidang lingkungan hidup	95,15 %

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.1. :

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				Rp 45,050,630,120			Rp 57,649,930,000	
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp 26,396,430,120			Rp 33,543,930,000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100%	Rp 5,500,216,620		100%	Rp 6,030,250,000	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Kali	Rp 1,520,000,000	APBD	2 Kali	Rp 1,672,000,000	
Materai		2340 lembar		2500 lembar					
Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak		31 buah		31 buah					
Terkelolanya surat masuk		12 bulan		12 bulan					

	Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan			12 bulan
	Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan			12 bulan
	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	230 unit			200 unit
	Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik	12 bulan			12 bulan
	Terlaksananya penataan arsip	12 m2			12 m2
	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	106 jenis			106 jenis
	Terlaksananya pengadaan barang cetakan	31 jenis			31 jenis
	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32 jenis			35 jenis
	Terlaksananya penggandaan/foto copy	100.000 lembar			200.000 lembar
	Terlaksananya pengiriman surat keluar 12 bulan	12 bulan			12 bulan

		Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip		75 box				75 box	
		Tersedianya bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama		12 bulan				12 bulan	
		Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih		46 jenis				50 jenis	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa keamanan kantor selama	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12 bulan	Rp 3,280,216,620	APBD		12 bulan	Rp 3,608,250,000
		Terlaksananya pengelolaan keuangan selama		12 bulan				12 bulan	
		Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama		12 bulan				12 bulan	
		Tersedianya Tenaga jasa kearsipan		12 bulan				12 bulan	
		Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorar/Tidak tetap		12 bulan				12 bulan	
		Terlaksananya Pengelolaan Barang		12 bulan				12 bulan	
		Terlaksananya Biaya Fumigasi		84 m3				84 m3	
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makan dan minum rapat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12 bulan	Rp 700,000,000	APBD		12 bulan	Rp 750,000,000

		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah		12 bulan			12 bulan	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Rp 4,216,731,500			Rp 4,577,680,000
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 unit	Rp 622,574,000	APBD	1 unit	Rp 684,680,000	
	Terlaksananya Rehabilitasi Kantor RPH Semanu dan RPH Giring		1 paket			1 paket		
	Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP		1 paket			1 paket		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15 jenis	Rp 850,000,000	APBD	25 jenis	Rp 950,000,000	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor 10 unit	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10 unit	Rp 700,000,000	APBD	12 unit	Rp 750,000,000	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan kendaraan dinas operasional 185 unit	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	185 unit	Rp 1,456,420,000	APBD	185 unit	Rp 1,520,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 36 jenis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36 jenis	Rp 587,737,500	APBD	36 jenis	Rp 673,000,000	

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR				Rp 26,776,000				Rp 32,500,000
	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12 bulan	Rp 26,776,000	APBD		12 bulan	Rp 32,500,000
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN				Rp 684,700,000				Rp 928,500,000
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Th 2018	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 dokumen	Rp 27,500,000	APBD		1 dokumen	Rp 33,500,000
		Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018		2 dokumen			2 dokumen		
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12 dokumen	Rp 57,200,000	APBD		12 dokumen	Rp 60,000,000
		Laporan Keuangan Semester		2 dokumen			2 dokumen		
		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan		1 dokumen			1 dokumen		
		Laporan Keuangan triwulan		4 dokumen			4 dokumen		
	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 kali	Rp 550,000,000	APBD		1 kali	Rp 750,000,000
		Tersusunnya dokumen statistik		1 dokumen			1 dokumen		

		Publikasi LH di Media Publik		3 media				3 media	
		Tersusunnya Renja OPD 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020		2 dokumen				2 dokumen	
		Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019		2 dokumen				2 dokumen	
		Tersusunnya ROPK 2019		1 dokumen				1 dokumen	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12 dokumen	Rp 50,000,000	APBD		12 dokumen	Rp 85,000,000
	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp 2,000,000,000				Rp 2,280,000,000
	Pengkajian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Validasi KLHS	D.I Yogyakarta	5 Kab/ Kota	Rp 1,490,000,000	APBD		5 Kab/ Kota	Rp 1,600,000,000
		Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan		12 bulan				12 bulan	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan		12 bulan				12 bulan	
		Terlaksananya Penyusunan IKPLHD		1 dokumen				1 dokumen	

		Terlaksananya Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY		1 dokumen				1 dokumen		
Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan	D.I Yogyakarta	40 perusahaan	Rp 510,000,000	APBD		40 perusahaan	Rp 680,000,000		
									Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan	15 keg/usaha
									Terlaksananya Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk	12 bulan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN				Rp 2,700,000,000				Rp 4,420,000,000		
Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Terlaksananya Gerakan bersih sungai	D.I Yogyakarta	72 lokasi	Rp 2,000,000,000	APBD		72 lokasi	Rp 3,500,000,000		
	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air		4 jenis				4 jenis			
	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara		1 jenis				1 jenis			

		4. Terlaksananya inventarisasi Gas Rumah Kaca		1 dokumen				1 dokumen	
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Koordinasi/ pembinaan pengelolaan limbah B3	D.I Yogyakarta	5 kab/kota	Rp 700,000,000	APBD		5 kab/kota	Rp 920,000,000	
			Pengelolaan Sampah				5 kab/kota		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP					Rp 2,600,000,000			Rp 3,350,000,000	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH	D.I Yogyakarta	4 penghargaan	Rp 1,400,000,000	APBD		4 penghargaan	Rp 1,800,000,000	
	Terselenggaranya kampanye penyadaran LH		3 even				3 even		
	Terselenggaranya pameran dalam dan luar daerah		12 bulan				12 bulan		
	Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklamasi, Kalpataru)		5 kab/kota				5 kab/kota		
	Sosialisasi Ekoefisiensi Gemi Nastiti Ngati-ati		5 kab/kota				5 kab/kota		

	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY	D.I Yogyakarta	1 unit	Rp 1,200,000,000	APBD		1 unit	Rp 1,550,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM				Rp 8,668,006,000				Rp 11,925,000,000
	Peningkatan tutupan vegetasi	DED Pengembangan Wanadesa	D.I Yogyakarta	2 dokumen	Rp 2,590,448,000	APBD		2 dokumen	Rp 4,300,000,000
		Monitoring Wanadesa		4 kabupaten				4 kabupaten	
		Pemeliharaan Wanadesa		10 lokasi				10 lokasi	
		Penanaman RTH JJLS - Rest Area		1 paket				1 paket	
		Pengembangan Wanadesa Wisata		1 lokasi				1 lokasi	
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	Monitoring telagadesa	D.I Yogyakarta	2 kabupaten	Rp 5,000,000,000	APBD		2 kabupaten	Rp 6,300,000,000	
	Pembangunan Telagadesa		4 lokasi				4 lokasi		
	Pemeliharaan Telagadesa		2 lokasi				2 lokasi		
	Pengelolaan DAS Prioritas		12 bulan				12 bulan		
	Penyusunan DED Telagadesa		12 lokasi				12 lokasi		
Konservasi Sumberdaya Hutan	Inventarisasi Jenis dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar	D.I Yogyakarta	1 dokumen	Rp 777,558,000	APBD		1 dokumen	Rp 850,000,000	

		Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai		6 Ha				6 Ha	
		Pembinaan masyarakat sekitar KSA/KPA		30 Orang				30 Orang	
	Pengamanan Hutan	Keamanan Hutan Terjamin	D.I Yogyakarta	12 bulan	Rp 300,000,000	APBD		12 bulan	Rp 475,000,000
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp 9,000,000,000				Rp 12,000,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL				Rp 9,000,000,000				Rp 12,000,000,000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	TPST Piyungan	10 Ha	Rp 9,000,000,000	APBD		10 Ha	Rp 12,000,000,000
Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA		1 unit		1 unit					
Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA		1,2 Km		1,2 Km					
Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik		5 unit		5 unit					
Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang		2 unit		2 unit					

		Operasi dan Pemeliharaan TPST		1 unit			1 unit	
		Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA		35 orang			35 orang	
		Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA		2 kali			2 kali	
		Pengadaan Perlengkapan K3		6 jenis			6 jenis	
	URUSAN KEHUTANAN				Rp 9,654,200,000			Rp 12,106,000,000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN				Rp 865,000,000			Rp 1,228,000,000
	Penataan Hutan	Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan	D.I Yogyakarta	2 lokasi	Rp 315,000,000	APBD	2 lokasi	Rp 425,000,000
		Kajian Potensi Hutan Rakyat		1 dokumen			1 dokumen	
		Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Kawasan Hutan		20 Km			35 Km	
		Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan		2 lokasi			2 lokasi	

Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Monitoring dan pembinaan produksi hasil hutan	D.I Yogyakarta	4 BDH	Rp 240,000,000	APBD		4 BDH	Rp 386,000,000
	Pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu		4 BDH				4 BDH	
	Pembinaan penatausahaan hasil hutan		20 Perusahaan				20 Perusahaan	
	Pengendalian peredaran hasil hutan		4 BDH				4 BDH	
	Penyusunan potensi HHBK dan Jasa Lingkungan di luar kawasan		2 kabupaten				1 kabupaten	
Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat	D.I Yogyakarta	4 kabupaten	Rp 310,000,000	APBD		4 kabupaten	Rp 417,000,000
	Fasilitasi administrasi penyuluhan kehutanan		12 bulan				12 bulan	
	Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat		50 orang				50 orang	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG				Rp 8,220,527,000				Rp 10,095,000,000
Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	Penyusunan Dokumen Kendali Petak	BDH Playen, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH	1 dokumen	Rp 415,000,000	APBD		1 dokumen	Rp 525,000,000

		Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD)	Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul	1 dokumen			1 dokumen	
		Penyusunan Rencana Teknis Tahunan		4 dokumen			4 dokumen	
	Perlindungan Hutan	Pencegahan dan penanggulangan gangguan kehutanan	BDH Playen, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul	12 bulan	Rp 720,177,000	APBD	12 bulan	Rp 875,000,000
		Pembinaan dan peningkatan peran masyarakat sekitar hutan		24 RPH			24 RPH	
	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Produk Hasil Hutan	BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul, BDH Panggang	2 komoditas	Rp 7,085,350,000	APBD	2 komoditas	Rp 8,695,000,000
		Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung		20 Ha			20 Ha	
		Tanaman Kayu Putih Baru		559.200 batang			559.200 batang	
		Pengadaan boiler dan hoist crane		1 unit			-	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI				Rp 1,592,872,000			Rp 1,421,000,000
	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Pemeliharaan I tanaman bambu	Playen	600 batang	Rp 180,000,000	APBD	600 batang	Rp 495,000,000
		Pemeliharaan satwa rusa		12 bulan			12 bulan	
		Penataan batas dalam		2 Km			3.5 Km	
		Penanaman tanaman mentaok dan timoho		800 batang			-	

		Pemeliharaan tanaman di jalan Nguwot		300 batang				300 batang	
Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura		Pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder	Playen	4 Angkatan	Rp 1,412,872,000	APBD		4 Angkatan	Rp 926,000,000
		Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir)		3 jenis				3 jenis	
		Promosi dan Publikasi Tahura Bunder		12 bulan				12 bulan	
		Pemeliharaan jalan masuk di Tahura Bunder		300 m				300 m	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN				Rp 568,673,000				Rp 783,000,000
Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan		Bibit tanaman kehutanan bersertifikat	Playen	600.000 batang	Rp 568,673,000	APBD		600.000 batang	Rp 783,000,000
		Sertifikasi bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan		12 bulan				12 bulan	
		Pengawasan peredaran benih/bbit tanaman kehutanan		4 kabupaten				4 kabupaten	
		Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan		3 jenis				3 jenis	

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas penganggaran urusan lingkungan hidup dan kehutanan adalah untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya hutan untuk mencapai sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya untuk itu, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menetapkan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Pengendalian pencemaran lingkungan, meliputi pengendalian pencemaran air dan udara dan Limbah B3
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan, meliputi pengelolaan sampah dan limbah
3. Peningkatan kapasitas lingkungan, meliputi pembinaan penghargaan lingkungan hidup nasional dan pengelolaan laboratorium lingkungan.
4. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
5. Peningkatan rasio pemanfaatan sumberdaya hutan

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada rancangan awal RPJMD, rancangan awal Renstra SKPD dan rancangan awal RKPD. Renja-SKPD ini juga merupakan gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan di DIY.

Kerjasama semua pihak serta kerja keras para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan rencana kerja 2019 yang telah disusun dalam dokumen ini, mengingat tantangan yang dihadapi dalam mencapai target juga tidak mudah.

Guna sempurnanya dokumen ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan tahun 2019.